

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI  
PENGANGGURAN;  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)**



**Oleh**

**NISAR**

**NIM. 11.2200.079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2016**

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENANGGULANGI PENGANGGURAN;  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)**



**Oleh**

**NISAR**  
**NIM. 11.2200.079**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2016**

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI  
PENGANGGURAN;  
PERSPEKIF EKONOMI ISLAM  
(Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun dan diajukan oleh

NISAR  
NIM. 11.2200.079

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

2016

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nisar  
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah dalam  
Menanggulangi Pengangguran; Perspektif  
Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang  
Kota Parepare)  
Nomor Induk Mahasiswa : 11.2200.079  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
No. St.19/PP.00.9/0120/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.  
NIP : 19730925 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI  
NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
  
Wahidin, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI  
PENGANGGURAN; PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)

disusun dan diajukan oleh

NISAR  
NIM. 11.2200.079

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 26 September 2016 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	( <i>RA</i> )
NIP	: 19730925 200501 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI	( <i>Wahidin</i> )
NIP	: 19711004 200312 1 002	



Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

( *Wahidin* )  
Wahidin, M.HI  
 NIP. 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Nisar

Nomor Induk Mahasiswa : 11.2200.079

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam No. St.19/PP.00.9/0120/2016

Tanggal Kelulusan : 26 September 2016

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua)

Wahidin, M.HI (Sekretaris)

Dr. Zaimal Said, M.H (Anggota)

Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H (Anggota)

Mengetahui:



Dr. Saltra Rustan, M.SI  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

### *Bismillāhir Rahmānir Rahīm*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Sarjana Ekonomi Islam pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Begitupula, shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Sayyidina Muhammad al-Mustafa saw.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Suami tercinta Hartono Ahmad atas dukungan dan motivasi yang sangat berharga buat penulis, beserta Ayahanda Toro Akkas dan Ibunda Hartati Puan Jango dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Wahidin, M.HI, selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., sebagai ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare,
2. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI., selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam (SEI) atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa,

3. Bapak/ibu dosen program studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
4. Kepala dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
5. Teman-teman di pondok Pink yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu, terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
6. Teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juni 2016

Penulis



Nisar

NIM.11.2200.079



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nisar  
NIM : 11.2200.079  
Tempat/Tgl. Lahir : Urung/18 Juni 1993  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Januari 2016

Penyusun



**NISAR**  
NIM. 11.2200.079

## ABSTRAK

**Nisar.** *Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)*, (dibimbing oleh Bapak H. Rahman Ambo Masse dan Bapak Wahidin).

Pemerintah

Pemerintah Kota Parepare dengan dukungan seluruh kompoenen masyarakat telah melaksanakan strategi penanggulangan pengangguran untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat”. Dari penelitian ini penulis ingin mengetahui strategi, pelaksanaan dan hasil penanggulangan pengangguran di Kec. Soreang Kota Parepare oleh pemerintah daerah. Kemudian bagaimana perspektif Ekonnomi Islam terhadap strategi, pelaksanaan dan hasil penanggulangan pengangguran tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif, data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Walikota bersama Perangkat Daerah Kota Parepare menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah telah mengupayakan peningkatan daya saing (ilmu pengetahuan) masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani meningkat sebesar 10,03 tahun dan Pendapatan per Kapita dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Karenanya, , strategi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi pengangguran sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam, di mana pemerintah sebagai kepala daerah (Khalifah) telah memberikan hasil positif bagi masyarakatnya sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam.

Kata kunci: Strategi, Penanggulangan Pengangguran, Ekonomi Islam.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PANGAJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7

2.2 Tinjauan Konseptual.....	8
2.3 Tinjauan Teoritis.....	9
2.3.1 Teori Strategi .....	9
2.3.2 Teori Pengangguran .....	10
2.3.3 Teori Ekonomi Islam.....	16
2.3.4 Penanggulangan Pengangguran dalam Ekonomi Islam.....	26
.....	
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.2 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Pengangguran..	44
4.3 Pelaksanaan Penanggulangan Pengangguran di Kecamatan Soreang Kota Parepare .....	54
4.4 Hasil Penanggulangan Pengangguran Oleh Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi pengangguran.. .....	62

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan..... 67

5.2 Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN – LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Luas Wilayah Kecamatan Soreang	42
2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Soreang	44
3.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2015	50
4.	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Daya Saing (Ilmu dan Pengetahuan) Masyarakat	63



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	32



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Adanya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan tingkat kemakmuran negara juga berkurang. Pengangguran juga dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, masalah konsumsi, kesehatan, serta prospek pembangunan di masa yang akan datang.

Masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk.

Daerah yang menjadi sorotan dalam penelitian ini terkhusus pada masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Parepare sebagai kota yang memberikan gambaran kehidupan yang menjanjikan bagi sebagian orang untuk mengais rezeki di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Fenomena ini semakin menambah keragaman Kota Parepare khususnya Kecamatan Soreang dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Namun di sisi lain juga mendatangkan masalah baru khususnya dalam hal pengangguran. Sebagian masyarakat di Kecamatan Soreang kota Parepare adalah imigran. Sebagian dari mereka tidak semua memperoleh pekerjaan dengan mudah. Selain itu cuaca juga merupakan faktor penyebab pengangguran. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pada musim

hujan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Begitupun dengan petani, pada musim kemarau mereka tidak dapat mengerjakan tanahnya, disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam. Apabila para petani dan nelayan tidak melakukan pekerjaan lain terpaksa mereka menganggur.

Survey penduduk pada data Badan Pusat Statistik Kota Parepare menunjukkan bahwa penduduk Kota Parepare pada tahun 2014 berjumlah 136.903 jiwa, kepadatan penduduk paling tinggi di Kecamatan Soreang yaitu sebesar 44,49% atau sekitar 60.909 jiwa. Otomatis jumlah penduduk di Kota Parepare akan meningkatkan jumlah pengangguran yang berdomosili di Kota Parepare, karena jumlah pengangguran di Kota Parepare dari hasil survey adalah 4,86% yakni 6.653 penduduk.<sup>1</sup>

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018, maka Pemerintah Kota Parepare dengan dukungan seluruh komponen masyarakat berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat”

Tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat pada dasarnya bukan saja merupakan beban pemerintah selaku penyelenggara Negara, namun juga menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta, oleh karena itu pendekatan kemitraan dalam upaya memberdayakan masyarakat merupakan sesuatu yang diidealkan. Dalam konsep kemitraan terdapat kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran dan keseimbangan peran antara pemerintah,

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, 2014

masyarakat dan swasta artinya pemerintah memberikan rambu dan aturan main secara umum baik peranannya dalam membuat kebijakan maupun pendanaan.

Masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan swasta memberikan energi dalam program pemberdayaan melalui investasi swasta. Konsep kemitraan muncul karena banyaknya masalah dalam pendekatan pembangunan pada masa yang lalu yang sifatnya *top-down* yang memposisikan pemerintah sebagai faktor dominan dan membiarkan sikap acuh tak acuh pihak swasta dalam memberdayakan kaum lemah.

Program pemberdayaan masyarakat miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang ditujukan kepada individu atau masyarakat melalui program-program pemerintah baik yang dilakukan oleh Disnaker, Dinsos, dan sebagainya, Program pendidikan nonformal merupakan salah satu program yang banyak dipilih untuk memberdayakan masyarakat yang tujuannya memberikan keterampilan maupun pelatihan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat menggunakan keterampilannya untuk mensejahterakan kehidupannya. Program pendidikan nonformal banyak dilakukan pada masyarakat baik yang dilakukan oleh sanggar kegiatan belajar masyarakat, PKBM, lembaga kursus dan pelatihan yang banyak tumbuh di masyarakat.

Ekonomi Islam menjelaskan tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Islam dewasa ini.<sup>2</sup> Kebahagiaan telah menjadi tujuan utama dari semua masyarakat. Meskipun kondisi material bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, tampak kepercayaan bahwa kebahagiaan dapat dijamin apabila tujuan-tujuan materi dapat direalisasikan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah untuk mengatasi

---

<sup>2</sup>Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* ( Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h. 4.

kemiskinan dan pengangguran seperti pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup terhormat dan distribusi kekayaan yang merata. Bagaimanapun juga tidak ada negara didunia ini baik negara kaya maupun miskin yang telah berhasil merealisasikan sasaran material tersebut.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam menekankan pada aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spritual umat manusia, hal ini disebabkan umat muslim percaya bahwa kedudukan antara orang miskin dan kaya, pengangguran dan yang bekerja memiliki kedudukan sama di mata Allah untuk menjadikan khalifah di bumi sekaligus sebagai hambanya. Kebahagiaan dan ketenangan batin tidak dapat dirasakan kecuali memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan spritual, dengan kata lain, titik tekan ekonomi Islam adalah memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara umum. Oleh karenanya Islam memiliki konsep ekonomi yang mengarahkan setiap manusia tidak berfokus pada unsur material yang menyebabkan setiap manusia menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun dengan upaya penanggulangan pengangguran, dalam pelaksanaannya tidaklah seorangpun berada dalam kedudukan untuk mendistribusikn sumber-sumber semau mereka. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab Suci al-Qur'an dan al-Hadis atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun menjadi lebih

---

<sup>3</sup>Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Cet. I; Surabaya: Gema Insani, 1999), h. 1-2.

baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka al-Qur'an atau al-Hadis.<sup>4</sup>

Melihat permasalahan yang telah di uraikan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)” dalam hal ini strategi penanggulangan pengangguran akan dilihat dari sisi Ekonomi Islam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan penanggulangan pengangguran oleh pemerintah daerah di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana hasil penanggulangan pengangguran oleh pemerintah daerah di Kecamatan Soreang Kota Parepare?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan pengangguran oleh pemerintah daerah di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui hasil penanggulangan pengangguran oleh pemerintah daerah di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

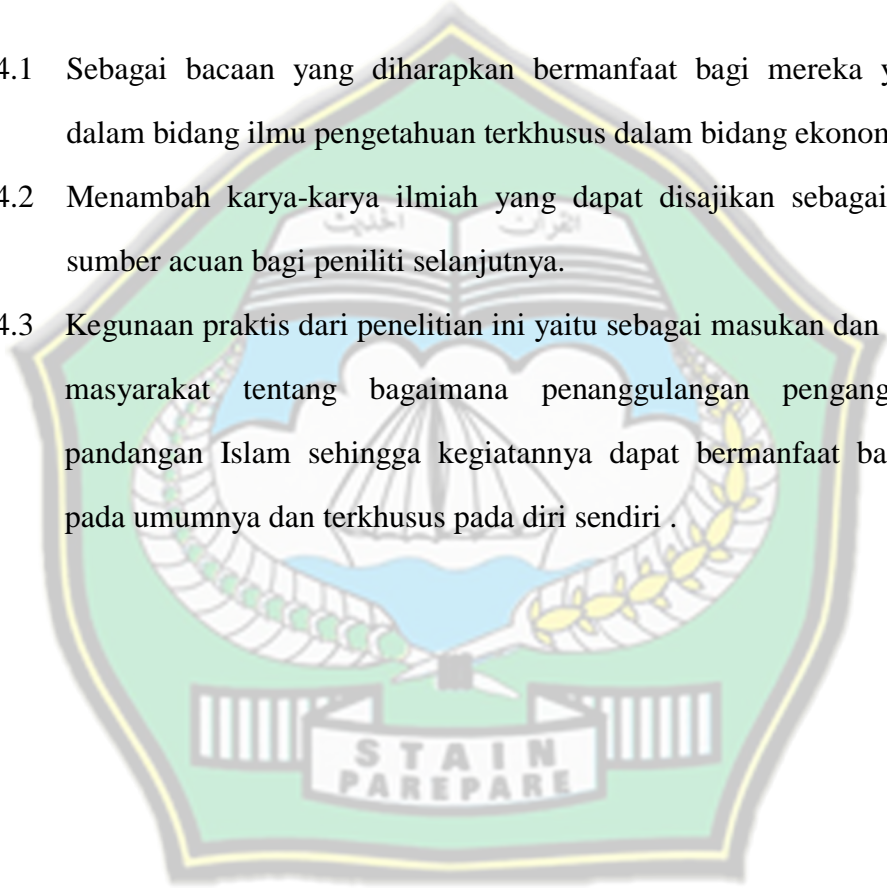
## **1.4 Kegunaan Penelitian**

---

<sup>4</sup>Edwin Nasution, Mustafa. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, h.15-16.

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan STAIN Parepare serta para generasi yang menginginkan perubahan ke arah perbaikan dalam menerapkan Ekonomi Islam terutama masyarakat yang menganggur. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus, antara lain :

- 1.4.1 Sebagai bacaan yang diharapkan bermanfaat bagi mereka yang berminat dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ekonomi.
- 1.4.2 Menambah karya-karya ilmiah yang dapat disajikan sebagai literatur atau sumber acuan bagi peneliti selanjutnya.
- 1.4.3 Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana penanggulangan pengangguran dalam pandangan Islam sehingga kegiatannya dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan terkhusus pada diri sendiri .



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya. Dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis menemukan penelitian berikut:

“Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pengangguran ( Studi Kasus di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi) Oleh: **Adam Ibrahim**, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang tepat untuk pelaksanaan penanggulangan pengangguran di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi harus konsisten dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidangnya. Selanjutnya pemerintah melaksanakan strategi-strategi untuk menanggulangi pengangguran yaitu :

2.1.1 Penciptaan lapangan kerja

2.1.2 Perluasan lapangan kerja dalam pelaksanaanya, hendaknya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap strategi-strategi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dapat diketahui kegagalan dan keberhasilan langkah-langkah yang dilakukan untuk selanjutnya digunakan sebagai pembenahan terhadap faktor-faktor yang diidentifikasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Adam Ibrahim, *Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pengangguran ( Studi Kasus di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi)*,(Skripsi

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah pelaksanaan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Batanghari. Kantor ini harus konsisten dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidangnya selanjutnya melaksanakan strategi-strategi, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah strategi penanggulangan pengangguran akan dilihat dari sisi perspektif Ekonomi Islam.

## 2.2 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

2.2.1 Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai.

2.2.2 Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 30 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA,

---

*Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*: Yogyakarta, 2009), h. 11.



Mahasiswa Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

2.2.3 Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam untuk mencapai falah berdasarkan pada al-Quran dan al-Hadis.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, maka strategi penanggulangan pengangguran adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang yang dilakukan untuk membuka peluang kerja bagi pengangguran. Beberapa langkah ini akan dilihat dari sisi Ekonomi Islam yang dalam artian akan dilihat berdasarkan kesesuaiannya dengan al-Qur'an dan al-Hadis.

## 2.3 Tinjauan Teoritis

### 2.3.1 Teori Strategi

Kata 'strategi' berasal dari bahasa Yunani "*strategos*" yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejenderalan atau ilmu kepanglimaannya. Strategi dalam pengertian kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang<sup>6</sup>

Pengertian strategi menurut Stephanie K. Marrus seperti yang dikutip oleh Sukristono, "Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai."<sup>7</sup>

Secara umum strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, yakni pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Definisi ini disesuaikan dengan kata strategi berasal dari

<sup>6</sup>Gulo, W. *Strategi Belajar Mengajar*. (Jakarta: Grasindo, 2008) .h.1

<sup>7</sup>Husein Umar, *Strategic Management In Action*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). h.31

kata kerja ahasa Yunani *stratego* yang berarti merencanakan pemusnahan musuh lewat penggunaan sumber-sumber yang efektif. Strategi dimaknai sebagai suatu cara atau kita mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi berarti memperhitungkan situasi dan kondisi (ruang dan waktu) yang akan dihadapi di masa yang akan datang guna mencapai efektifitas

### 2.3.2 Teori Pengangguran

#### 2.3.2.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam golongan angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, Mahasiswa Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara berkembang akan tetapi juga dialami oleh negara maju dan terkhusus pada Kota Parepare. Secara umum pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran, pengangguran pada prinsipnya mengandung arti melemahnya

---

<sup>8</sup>Onong Uchjana, Effendi, *Ilmu Komunikasi, Teori, dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2005, h. 6.

pertumbuhan produk dan adanya kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan menyebabkan pemborosan sumber daya manusia, disamping memperkecil pertumbuhan produk, pengangguran juga mengacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi, hal ini terutama terjadi pada negara maju dan pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan tunjangan bagi para penganggur.<sup>9</sup>

Pengangguran merupakan perhatian masyarakat yang paling utama dalam setiap perekonomian modern, apabila tingkat pengangguran tinggi akan menyebabkan sumber daya terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang, dalam masa-masa seperti itu, tekanan ekonomi menjalar kemana-mana sehingga mempengaruhi emosi masyarakat maupun kehidupan rumah tangga, masyarakat sangat membutuhkan tersediannya banyak lapangan kerja karena keadaan seperti ini dapat berarti dapat menghasilkan output yang tinggi dan pendapatan yang tinggi.<sup>10</sup> Banyak kelompok masyarakat menganggap bekerja mempunyai nilai tersendiri, jika angka pengangguran tinggi, maka akan banyak output yang hilang, pendapatan menurun, dan masyarakat menderita batin karena hilangnya harga diri.

Salah satu penyebab timbulnya pengangguran dalam suatu negara adalah bertambahnya jumlah penduduk, mutu, baik kualitas maupun kuantitas penduduk suatu negeri merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standar hidup suatu negara. Hal ini disebabkan karena penduduk merupakan sumber tenaga kerja dan disamping itu faktor produksi skill.<sup>11</sup> Tujuan dari penambahan lapangan kerja adalah untuk meningkatkan kondisi rakyat miskin yang terhambat dengan adanya problem pengangguran dalam suatu masyarakat.

---

<sup>9</sup>Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori Masalah dan Kebijakan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, h. 249.

<sup>10</sup>Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi*, Edisi. 4. Jakarta: Erlangga, 1992, h. 286-288.

<sup>11</sup>Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Cet, VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.77.

Dalam mencapai *fullemployment* atau kesempatan kerja penuh, setiap manusia terkhusus pada individu mencari peluang agar dapat meningkatkan pertumbuhan produk (output) sepanjang waktu serta memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.<sup>12</sup> Dalam Islam mengharuskan setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan menghindari bermalas-malasan karena sifat tersebut merupakan perbuatan syetan. Islam mengajarkan ummatnya untuk berfikir rasional (masuk akal) dan melakukan tindakan-tindakan yang benar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.<sup>13</sup>

#### 2.3.2.2 Jenis-jenis pengangguran

Berdasarkan pada ciri pengangguran yang berlaku pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut yaitu:

##### 2.3.2.2.1 Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari tenaga kerja, sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan, efek dari keadaan ini di dalam jangka waktu yang panjang mereka tidak melakukan pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata, pengangguran terbuka sebagai akibat kegiatan ekonomi yang menurun dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja.

##### 2.3.2.2.2 Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran berwujud dari sektor pertanian dan jasa, setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor, antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan

<sup>12</sup>Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, (Cet, II; Jakarta: Irtikas,2012.), h. 168.

<sup>13</sup>Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Cet, IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), h. 51.

adalah: besar atau kecilnya perusahaan, kelebihan tenaga kerja yang digunakan dalam pengangguran tersembunyi, contoh-contohnya adalah pelayan restoran dan keluarga petani dengan keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

#### 2.3.2.2.3 Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terdapat pada sektor pertanian dan perikanan, pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur, pada musim kemarau para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya, disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam, apabila para petani dan nelayan tidak melakukan pekerjaan lain terpaksa mereka menganggur, pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim dan sebagian pengangguran ini terjadi pada masyarakat Soreang Kota Parepare atau mayoritas penduduk tersebut sebagian nelayan.

#### 2.3.2.2.4 Setengah Menganggur

Negara-negara berkembang penghijrahan atau imigrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagian akibatnya, tidak semua orang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah, sebagian terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu.<sup>14</sup> Disamping mereka mungkin bekerja satu minggu atau dua minggu atau hanya empat hari, dari hasil pengamatan awal penulis bahwa masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagian besar imigran dari desa ke Kota, dan sebagian dari mereka tidak semua memperoleh pekerjaan dengan mudah ketika sampai di kota.

Ditinjau dari ekonomi makro jika dalam suatu keluarga pengangguran bertambah, berbagai masalah akan timbul, pertama keluarga tersebut mempunyai

---

<sup>14</sup>Sadono sukirno, *Makro Ekonomi Teori dan Pengantar*, (Cet, XV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 330-331.

kemampuan terbatas untuk melakukan pembelanjaan, maka secara langsung pengangguran dapat mengurangi taraf hidup masyarakat, seterusnya pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak, efek dari psikologi pengangguran seperti merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri dan perselisihan dalam keluarga merupakan masalah lain yang ditimbulkan oleh pengangguran. Dalam konsep ekonomi Islam setiap individu tidak hanya memperhatikan unsur material akan tetapi memperhatikan unsur spritual.

Unsur material merupakan segala kenikmatan yang disediakan Allah kepada manusia di bumi, Islam memandang kehidupan di dunia ini sebagai sejumlah kehidupan yang baik dan dengan sengaja Allah menciptakan untuk hambanya secara garis besar terdapat 7 tujuh buah kenikmatan yaitu nikmat makan dan minum dari berbagai kelezatan, nikmat pakaian dan perhiasan, nikmat tempat tinggal, nikmat kendaraan, nikmat berumah tangga, bersuka ria, dan nikmat keindahan. Ketujuh unsur tersebut merupakan unsur material yang diberikan manusia dari Allah.<sup>15</sup> Akan tetapi manusia dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan serta berfokus kepada dunia, melainkan dapat menyeimbangkan antara unsur material dan spritual agar terwujudnya nilai falah dalam kehidupannya dan menjadikan tujuannya sebagai sarana menuju hari akhir.

### 2.3.2.3 Dampak Pengangguran

Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak dan akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat, setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan

---

<sup>15</sup> Rahmani Timorita, *Aplikasi Hukum Islam dalam Praktik Ekonomi Islam di Indonesia*, Surabaya: Mitra Jaya, h.18.

masyarakat mencapai tujuan, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian adalah:

2.3.2.3.1 Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapai dan menyebabkan pertumbuhan produk (output) yang dicapai lebih rendah, keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai lebih rendah dari tingkat yang akan dicapai.

2.3.2.3.2 Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah (tax revenue) berkurang. Pengangguran disebabkan oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi semakin sedikit, dengan demikian tingkat pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.

2.3.2.3.3 Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya keterampilan, keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktik. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama menyebabkan tingkat keterampilan (skills) pekerja semakin merosot.

2.3.2.3.4 Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju, para penganggur memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, dan oleh sebab itu, mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya. Mereka tidak perlu bergantung kepada tabungan mereka atau bantuan orang lain. Sebaliknya, di negara-negara berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran, dan karenanya, kehidupan penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman/ bantuan

keluarga dan teman-teman keadaan ini potensial bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis.

2.3.2.3.5 Pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. *Pertama*, pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Keadaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi dimasa yang akan datang. *Kedua*, pengangguran yang timbul sebagai akibat dari kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.<sup>16</sup>

### 2.3.3 Teori Ekonomi Islam

#### 2.3.3.1 Pengertian Ekonomi Islam

Dalam membahas Perspektif Ekonomi Islam, ada satu titik awal yang harus benar-benar kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada al-Qur’an al Karim dan as-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.<sup>17</sup> Ekonomi Islam membawa kepada konsep al-Falah (kejayaan) didunia dan akhirat, ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai Khalifah dibumi dimana segala bahan-bahan yang ada dibumi dan di langit diperuntukkan untuk manusia, mencari ridha Allah merupakan faktor utama dalam melakukan aktivitas ekonomi, karena pengaruh keyakinan yang kuat akan kehadiran

<sup>16</sup>Muana nanga, *Makro Ekonomi*, h. 254.

<sup>17</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Univ. Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,(Cet.4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.19



Allah, dan ide-ide yang kuat antara lain yakni kesejajaran manusia dihadapan Allah tentang orang miskin memiliki hak atas kekayaan orang kaya, tentang kewajiban orang kaya untuk membelanjakan kekayaannya secara sederhana karena mereka bukan pemilik melainkan penerima amanat atas kekayaan itu, pada dasarnya manusia merupakan pelaku yang bebas dan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>18</sup>

Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah mereka berjuang dengan segala cara untuk mencapainya demi memenuhi kebutuhan hidup. Jika manusia menyadari pentingnya falah, maka mereka akan salah berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai falah, karena pada umumnya ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah dan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah.<sup>19</sup>

#### 2.3.3.2 Karakteristik Ekonomi Islam

Sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama dalam mengatur teori dalam Ekonomi Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah).

---

<sup>18</sup>Nawab Haider Navqi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.20.

<sup>19</sup>Edwin Nasution, Mustafa. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, h.15

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Mawsu'ah al-Ilmiyahwa al-Aamaliyahal-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut:

#### 2.3.3.2.1 Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah atas Harta

Semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karna Dia-lah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberika hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati hal milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

#### 2.3.3.2.2 Ekonomi terkait dengan Akidah, Syariah (Hukum), dan Moral

Hubungan Ekonomi Islam dengan Akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang disediakan untuk kepentingan manusia. Hubungan Ekonomi Islam dan Akidah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah larangan pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas kepentingan orang lain, larangan melakukan penipuan dalam transaksi, larangan menimbun sarana-sarana moneter, dan larangan melakukan pemborosan.

#### 2.3.3.2.3 Keseimbangan anantara Kerohanian dan Kebendaan

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karna itu, aktivitas keduniaan tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.

#### 2.3.3.2.4 Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, dalam melakukan kegiatan ekonomi.

#### 2.3.3.2.5 Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan namun kebebasan tersebut tidak boleh aturan aturan yang telah digariskan Allah SWT. Dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”<sup>20</sup>

#### 2.3.3.2.6 Negara Diberi Wewenang dalam Turut Campur Perekonomian.

Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.46

negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

#### 2.3.3.2.7 Bimbingan Konsumsi

Dalam bimbingan konsumsi Allah melarang manusia melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

#### 2.3.3.2.8 Petunjuk Investasi

Kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi adalah memilih proyek yang baik menurut Islam, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat, memperbaiki pendapatan, memelihara dan menumbuhkembangkan harta, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat.

#### 2.3.3.2.9 Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

#### 2.3.3.2.10 Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).<sup>21</sup>

#### 2.3.3.3 Kegunaan Ekonomi Islam

---

<sup>21</sup>Edwin Nasution, Mustafa. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, h.17-29.

Dalam lingkungan Ekonomi Islam, andil dalam rencana pertumbuhan dapat menjadi lebih aktif dan lebih jauh dari penyelewengan maupun eksploitasi. Sebab andil ini dapat saja berubah menjadi semacam ibadah. Dan ikut bersama andil itu, alat pengawasan tumbuh lebih kuat alat yang ada di semua Negara, yaitu takut kepada Allah dan perhatian terhadap-Nya, yang bersemayam dalam hati nurani Individu Muslim.

Perbedaan Ekonomi Islam dengan Ekonomi hasil penemuan manusia adalah Ekonomi Islam merupakan bagian dari system Islam yang mencakup akidah dan syariatnya. Hubungan ini memberi kesempatan kepada kegiatan ekonomi untuk bersifat ibadah dan menumbuhkan kontrol yang sebenarnya dari dalam diri muslim sendiri dan bukan dari luar.

Dari sinilah tampak pentingnya Ekonomi Islam dan peranannya dalam hubungannya dengan dunia Islam. Ia merupakan jalan yang akan mengikatkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini dalam keimanan.

Ada peranan lain yang masih mungkin dapat dilaksanakan oleh Ekonomi Islam, yaitu lapangan penerapan dalam dunia Islam sendiri, yakni melaksanakan penerapan ekonomi Islam sebagai terwujudnya kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia. Kesatuan ekonomi ini merupakan jalan masuk yang sangat penting ke arah kesatuan politik.

Apabila dunia Islam mau mengambil ilham dari contoh-contoh peristiwa masa lalu, pasti akan mengerti bagaimana merealisasikan angan-angan di masa depan.<sup>22</sup>

#### 2.3.3.4 Ethos Kerja dalam Ekonomi Islam

---

<sup>22</sup>Muhammad Al-‘Assal Ahmad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*(Cet.I; Bandung: Pustaka Setia,1999), H.39.

Ethos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Ethos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata ethos ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral sehingga dalam ethos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin.<sup>23</sup>

Kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual atau fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan. Kamus besar bahasa Indonesia susunan WJS Poerdarminta mengemukakan bahwa kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Lebih lanjut dikatakan bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT. Ethos kerja seorang muslim ialah semangat menapaki jalan lurus, mengharapkan ridha Allah SWT. Etika kerja dalam Islam yang perlu diperhatikan adalah:

2.3.3.4.1 Adanya keterkaitan individu terhadap Allah sehingga menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya.

---

<sup>23</sup>Anonim, *Konsep dan Etika Kerja dalam Islam*, Jakarta: Almadani;1997, h. 50.

2.3.3.4.2 Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan.

2.3.3.4.3 Tidak memaksakan seseorang, alat-alat produksi atau binatang dalam bekerja, semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar.

2.3.3.4.4 Tidak melakukan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah.

Bekerja merupakan ibadah dan harga diri sebagai Manusia. Alangkah mulianya ajaran dalam Islam tentang ethos kerja, ajaran ethos kerja juga telah di contohkan Rasulullah. Ketika masa remaja Rasulullah merupakan seorang pedagang yang ulet, beliau berdagang jauh sampai ke Syam (Suriah sekarang). Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. Dalam kepustakaan Islam, Nabi melarang mengemis kecuali dalam keadaan darurat, ibadah yang paling baik adalah bekerja, pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah mengurangi pengangguran dengan cara menyediakan kesempatan kerja pada para individu.

Buruh salah satu contoh pengangguran musiman karena hanya dapat bekerja jika terdapat kontrak, namun buruh yang bekerja dengan baik dan menghindari meminta-minta dipuji oleh Nabi Muhammad saw. Sebagaimana hadis Nabi memerintahkan manusia untuk berusaha yaitu:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْيَلَهُ (جَمْعُ حَبْلٍ) ثُمَّ  
يَأْتِي الْجَبَلَ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى  
ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ  
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ  
أَوْ مَنَعُوهُ

Terjemahannya:

Sesungguhnya seorang yang berangkat kegunung, membawa talinya, lalu memikul seikat kayu bakar diatas punggungnya, lalu dijualnya, yang dengannya Allah menjaga wajahnya, adalah jauh lebih baik baginya daripada memintaminta kepada orang lain, yang bisa diberi dan ditolak.<sup>24</sup>

Perbuatan meminta merupakan celaan dalam Agama. Usaha ialah bagian dari tugas ibadah, dan mencari rezeki halal suatu keutamaan bagi tiap muslim Tujuan yang wajib dicapai seorang muslim dalam bekerja berdasarkan tuntunan syariat yaitu:

#### 2.3.3.4.1 Mencukupi Kebutuhan Hidup

Memenuhi kebutuhan pribadi dengan mencari harta yang halal adalah perbuatan mulia, sehingga mencegah dari perbuatan hina yaitu meminta-minta, mengemis, dan mengharap belas kasihan orang lain, perbuatan ini tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus yaitu menderita kemiskinan, memiliki utang yang menjerat, dan *diyah murhiqah*(menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan). Setiap muslim harus menjaga tangannya agar tetap berada diatas.

#### 2.3.3.4.2 Kemaslahatan Keluarga

Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk bekerja, baik laki-laki dan perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing, orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya adalah *fi sabilillah*.

#### 2.3.3.4.3 Kemaslahatan Masyarakat

Seorang muslim tidak hanya bekerja untuk dirinya ataupun keluarganya tetapi wajib pula bekerja pada masyarakat demi mencapai kesejahteraan dan manfaat pada komunitas manusia. Norma penting dalam berproduksi ialah “wajib bekerja”, Islam tidak meminta penganutnya sekedar bekerja, tetapi juga meminta agar bekerja

<sup>24</sup>HR Bukhari dari Zubair, 3/265 dan 4/260



dengan tekun dan baik. Tekun dalam bekerja merupakan suatu kewajiban dan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.<sup>25</sup>

Jauh sebelum periode kenabian Muhammad para Rasul juga di ajarkan untuk memelihara etos kerjanya, Nabi Nuh pandai membuat Kapal, Nabi Musa seorang pengembala, Nabi Sulaiman seorang insiyur yang hebat, Nabi Yusuf seorang akuntan, Nabi Zakaria seorang tukang kayu, Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni, dll. Padahal kalau Allah berkehendak para Nabi yang membawa misi untuk menyeru menyembah hanya satu Tuhan bisa hidup dengan parlente, hidup bergelimang kemewahan. Di sini Allah memberikan hikmah kepada manusia, Nabi (utusan Allah) tidak hanya menyeru manusia menyembah Satu Tuhan tapi juga menyeru manusia untuk memakmurkan alamnya.

Ethos kerja tidak bisa dilepaskan dari bekerja profesional diawali dengan Bismillillah dengan niat karena Allah (*innamal amalu binniyat*). Dalam konsep sederhana manajemen modern Etos Kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen yaitu *planning, organizing, staffing, directing dan controlling*. Dalam Islam di kenal dengan istilah ihsan, Menurut Nurcholis Madjid, ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin, bahkan sesempurna mungkin. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS al-Qashash/28 ayat 77 mengatakan:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّدَكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Terjemahnya:

<sup>25</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 1997),h. 109-112.

“Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia, dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>26</sup>

Ehtos kerja sangat berpengaruh pada keberhasilan seseorang. Demikian juga kesuksesan dalam pendidikan. Dengan ethos kerja yang tinggi diharapkan seseorang menjadi cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab, terutama pada dirinya sendiri. Nabi Muhammad Saw menganjurkan umatnya agar bekerja dan berkarya dengan kemampuan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup, mencari ilmu atau belajar untuk meningkatkan kualitas diri, untuk melaksanakan anjuran Nabi tersebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu:

2.3.3.4.1 Dalam bekerja dan berkarya, selain diperlukan pendidikan yang cukup dan semangat yang tinggi, juga harus dengan cara yang halal dan baik, sesuai dengan ajaran Islam.

2.3.3.4.2 Selalu menumbuhkan motivasi dan semangat untuk meningkatkan keilmuan dengan berbagai cara.

2.3.3.4.3 Untuk mempelajari keterampilan, akan lebih berhasil bila kesempatan untuk mempraktikkannya.

#### **2.3.4 Penanggulangan Pengangguran dalam Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami, yang dimaksud dengan cara Islami adalah cara yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, Ekonomi Islam berdasarkan

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.623

pada segala aspek tujuan dan mengandung nilai yang berdasar pada agama Islam, Ekonomi Islam dibangun atas dasar perilaku individu yang rasional Islami dalam hal ini tidak dimaknai dengan rasional sempit, melainkan perilaku logis bagi setiap individu yang sadar dan perhatian untuk memperoleh falah, hal ini menuntut manusia untuk bervisi dan berprinsip jangka panjang, perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai falah.<sup>27</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari Agama Islam sebagai derivasi dari Agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti Agama Islam dari berbagai aspeknya, Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termaksud dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku parmanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi, secara umum agama diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta, dan peran tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, inilah yang disebut dengan implementasi Islam secara Kaffah (menyeluruh). Pengertian implementasi secara kaffah adalah bahwa ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia harus dibingkai ajaran Islam, dengan menjalankan Islam secara kaffah berarti menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan bukan sekedar pedoman ritual antara manusia dengan Tuhan.

---

<sup>27</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*, Edisi 1-4; Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h.44.

Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi, Allah SWT telah menetapkan batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya, perilaku mereka telah ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) yang harus diawasi seluruh masyarakat, berlakunya aturan membentuk lingkungan dimana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka. Aturan ini bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan kekuatan tertinggi (Allah), kehidupan sesama manusia didunia antara sesama makhluk untuk mencapai tujuan akhir.

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kedaulatan sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-mahluknya. Manusia tanpa diragukan merupakan tatanan makhluk tertinggi diantara makhluk yang telah diciptakannya, dan segala sesuatu yang ada dimuka bumi dan dilangit ditempatkan dibawah perintah manusia, dan manusia berhak memanfaatkan amanat Allah sebagai pengemban Khalifah, manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi manusia memiliki batas tertentu terhadap perilaku manusia dan Allah telah menetapkan kewajiban tertentu pada manusia, semua manusia tergantung pada Allah, semakin ketat ketergantungan manusia kepada Allah maka akan sangat dicintainya.

Setiap orang secara pribadi bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat atau menlenyapkan kesulitan yang dihadapi sehingga pada akhirnya individu bertanggung jawab atas setiap kegagalan usaha masyarakat dalam bekerja. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Allah mencintai orang mukmin yang berusaha, melakukan pekerjaan demi memenuhi kebutuhannya dan keluarganya dengan usaha dari tanganya sendiri apabila ia bekerja dengan jujur.

Ada tiga perkara manusia yang malas dalam menjalankan usaha yakni tipis keagamaanya, lemah akal nya dan hilang kehormatan dirinya. Umar r.a berkata: janganlah duduk dari mencari rezaki dan seraya berdo'a: wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah aku rezeki! Sesungguhnya kamu mengetahui, bahwa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak. Kecuali dengan melakukan usaha. Salah satu usaha yang ditekankan oleh Nabi Muhammad saw. kepada manusia ialah melakukan aktivitas perniagaan. Nabi Muhammad saw. bersabda "Haruslah kamu berniaga, karena perniagaan itu 90%, dari rezeki" sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2 ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.<sup>28</sup>

Firman Allah dalam Q.S An-Naba/78 ayat 11:

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا

Terjemahnya:

Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.<sup>29</sup>

Bekerja dalam pandangan Islam diarahkan untuk mencari karunia Allah SWT, yakni untuk mendapatkan harta demi memenuhi kebutuhan hidup yang sejahtera, agar bernilai ibadah, pekerjaan dijalankan dengan cara yang halal. Wujud bekerja sangat luas, jenisnya bermacam-macam, secara umum dapat dikategorikan dalam dua golongan aktivitas, yakni bekerja untuk mendapatkan harta dan bekerja

<sup>28</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1015.

untuk mengembangkan harta, baik dilakukan dengan usaha sendiri maupun bentuk usaha bersama (*syirkah*).

Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang tersedia. Pengangguran ini menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapat masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.<sup>30</sup>

Negara berkembang seperti Indonesia ini, masalah pengangguran yang makin meningkat dalam pembangunan ekonomi merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa tahun ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak dapat mengadakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan cepat daripada pertumbuhan penduduk. Oleh karenanya itu masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-Falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai Khalifah di bumi di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit diperuntukkan untuk manusia, mencari ridha Allah merupakan faktor utama dalam melakukan aktivitas ekonomi, karena pengaruh keyakinan yang kuat akan kehadiran Allah, dan ide-ide yang kuat antara lain yakni kesejajaran manusia dihadapan Allah tentang orang miskin memiliki hak atas kekayaan orang kaya, tentang kewajiban orang kaya untuk membelanjakan kekayaannya secara sederhana karena mereka bukan pemilik melainkan penerima

---

<sup>30</sup>Chaerul, <http://cupcakecha.blogspot.com/2014/02/pengangguran-dan-teori-migrasi.html>

amanat atas kekayaan itu, pada dasarnya manusia merupakan pelaku yang bebas dan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>31</sup>

Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah mereka berjuang dengan segala cara untuk mencapainya demi memenuhi kebutuhan hidup. Jika manusia menyadari pentingnya falah, maka mereka akan salah berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai falah, karena pada umumnya Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai al-Qur'an dan sunnah.

Teori Ekonomi Islam megemukakan bahwa etika perekonomian suatu Negara dilanda kekacauan dengan sebab-sebab sebelumnya yang kebanyakan menyimpang dari Syariat Islam, maka manusia sebagai khalifah Allah di bumi harus menyadari bahwa segala hal yang ada di bumi adalah amanah bagi manusia agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.<sup>32</sup>

Dalam sistem kenegaraan yang menerapkan Syariah Islam, mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah atau Kalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu: Mekanisme Individu dan Sosial Ekonomi.

---

<sup>31</sup>Nawab Haider Navqi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.20.

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.1, hal.4.

### 2.3.4.1 Mekanisme Individu

Dalam mekanisme ini Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt. serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup.

Banyak nash al-Quran maupun as-Sunnah yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja. Misalnya, firman Allah Swt. Dalam QS al-Mulk/67 ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ



Terjemahan:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>33</sup>

Jelas, Islam mewajibkan kepada individu untuk bekerja. Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja maka Khalifah berkewajiban untuk memaksa individu bekerja serta menyediakan sarana dan prasarannya, termasuk di dalamnya pendidikan. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal. Saat itu beliau berkata, “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.”

<sup>33</sup> <sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 956



Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.

#### 2.3.4.2 Mekanisme Sosial Ekonomi

Mekanisme ini dilakukan oleh Khalifah melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran.

##### 2.3.4.2.1 Negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.

Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan Khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor real baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

Kebijakan di sektor pertanian, di samping intensifikasi juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil tanah yang telah dilerantarkan selama tiga tahun oleh pemiliknya, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika berada di Madinah. Itulah yang dalam Syariat Islam disebut pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta *Baitul Mal* dalam rangka memenuhi hajat hidup atau memanfaatkan kepemilikannya.

Kebijakan sektor industri Khalifah akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain. Selama ini negara-negara Barat selalu berusaha menghalangi tumbuhnya industri alat-alat di negeri-negeri kaum Muslim agar negeri-negeri Muslim hanya menjadi pasar bagi produk mereka.

Kebijakan di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, Khalifah sebagai Wakil Umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta.

. Adapun dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, Khalifah tidak mewajibkan wanita untuk bekerja, apalagi dalam Islam, fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga (*ummu wa rabbah al-bayt*). Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki. Dengan kebijakan ini wanita kembali pada pekerjaan utamanya, bukan menjadi pengangguran, sementara lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi oleh laki-laki kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi oleh wanita.

2.3.4.2.2 Negara menyediakan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan), dimana Islam melalui negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap, maka terhadap pemenuhan kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara.

2.3.4.2.3 Negara harus berpihak kepada pengusaha maupun buruh secara adil.

Hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang saling menguntungkan.

Pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkannya. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa kepadanya.

Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara jelas dan rinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijarah *al-ajir* (kontrak kerja). Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja; penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja; termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya.

Terkhusus masalah pengupahan, pengusaha tidak boleh memperlakukan pegawainya sewenang-wenang, mengurangi haknya, atau, apalagi tidak membayar gajinya. Demikian Rasulullah memerintahkan. Pegawai bekerja karena membutuhkan makan dan minum, juga anak-anaknya.

Kesewenang-wenangan, bagaimanapun akan dibalas, entah ketika di dunia maupun di akhirat. Rasulullah s.a.w. mengatakan “ orang yang mampu menunda pembayaran adalah dzalim, dan boleh dihakimi dan di hukum.” (HR. Abu Daud)

Dari HR. Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda,

“Orang kaya yang menunda pembayaran utang adalah kedzaliman.”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Al-‘Adawy Musthafa, *Fikih Akhlak*. Qisthi Press (Jakarta: 2005). Hal. 385

Dengan jelasnya dan rincinya ketentuan-ketentuan dalam transaksi *ijarah al-ajir* tersebut, maka diharapkan masing-masing pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Itulah mekanisme Islam yang insya Allah bisa mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara adil. Ini hanya akan terwujud jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islamiyah

Dalam pandangan Islam suatu daerah akan lebih baik kalau ada penekanan pada pembagian kerja untuk mengarah pada satu tujuan bersama: yaitu kesejahteraan dunia akhirat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan umat hendaknya menjadi program yang terdesain dengan jitu dan terukur dengan mudah, sehingga akan mulus pula keberhasilannya.<sup>35</sup>

Berdasarkan sudut pandang Islam, Kecamatan Soreang sebagian masyarakatnya merupakan pengangguran *Jabbariyah*, dimana penduduknya terpaksa untuk tidak bekerja dikarenakan banyak hal, diantaranya sedikitnya lapangan pekerjaan daripada pekerjaannya, dikarenakan lanjut usia sehingga orang tersebut tidak mampu untuk bekerja lagi.

Islam juga menganjurkan agar manusia tidak menganggur, karena menganggur identik dengan bermalas-malasan. Dengan bermalas-malasan, maka manusia cenderung akan melakukan suatu hal yang negatif. Islam juga mendorong pemeluknya untuk berkarya, berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, berdagang dll. Islam tidak semata-mata memerintahkan untuk bekerja, tetapi bekerja harus dengan baik

---

<sup>35</sup>Azizy A.Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Pustaka Pelajar (Yogyakarta:2004). Hal.17

(ihsan) penuh ketekunan dan profesional. Ihsan dalam bekerja merupakan kewajiban yang wajib di lakukan oleh setiap muslim.<sup>36</sup>

Bermalas-malasan atau menganggur selain mendatangkan efek negatif bagi pelaku secara langsung, juga akan mendatangkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian. Karena pengangguran akan mengakibatkan ketidak optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi akibat sebagian potensi faktor produksi yang tidak termanfaatkan.

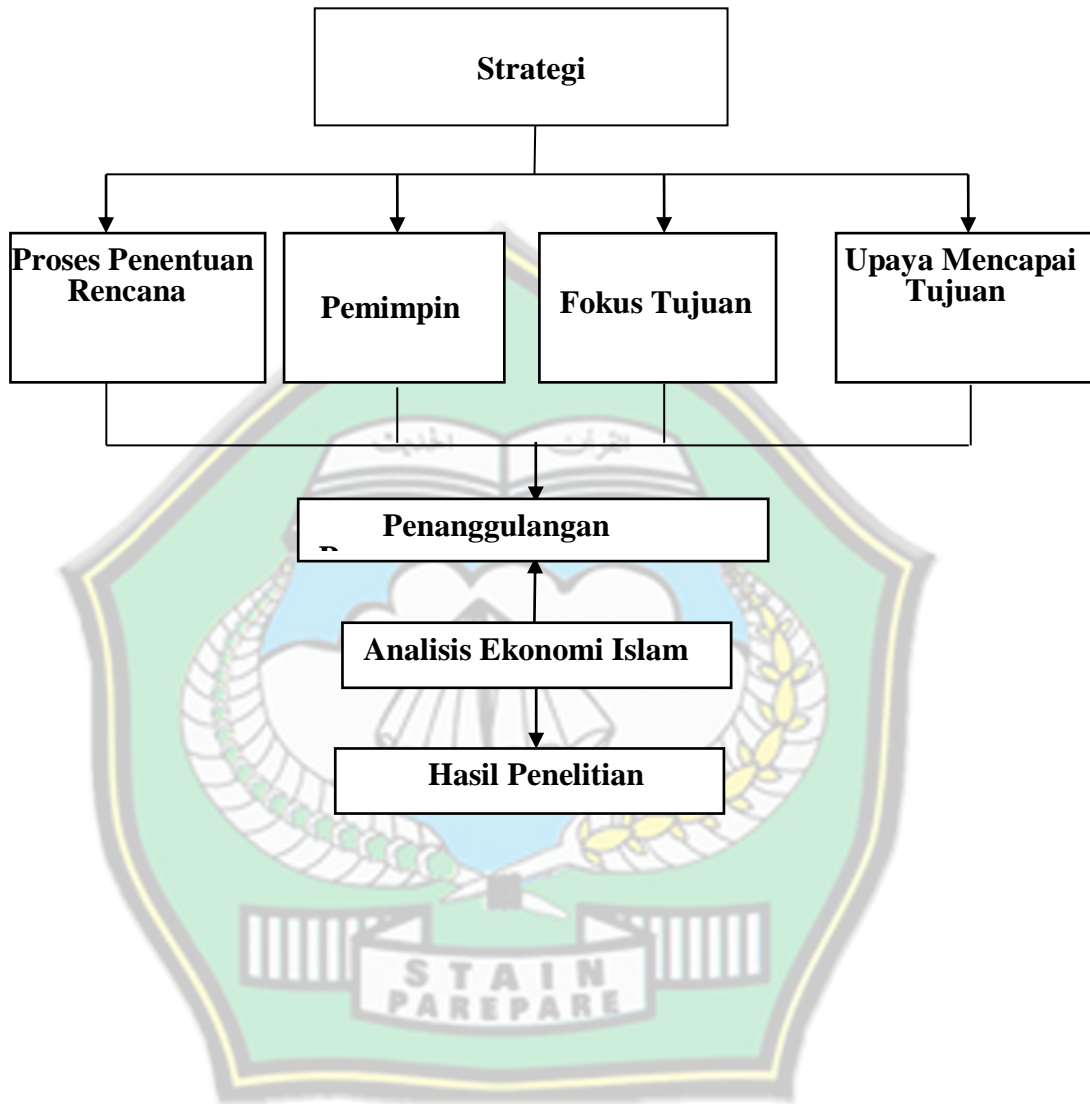


---

<sup>36</sup>M.Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, P3EI UII Yogyakarta, PT.Tiara Wacana, YK-1992, h.63.

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>37</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah dipahami. Menurut penulis pendekatan ini mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta terjadi lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Parepare dalam rentang waktu  $\pm$  2 bulan.

---

<sup>37</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap penanggulangan pengangguran di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data ialah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>38</sup> Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder, adapun sumber data tersebut adalah :

#### 3.4.1 Data primer berasal dari :

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pelaksanaan observasi dan wawancara, tepatnya pada Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, dan Camat Soreang Kota Parepare.

#### 3.4.2 Data sekunder berasal dari :

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berasal dari

##### 3.4.2.1 Buku-buku Ekonomi Islam.

##### 3.4.2.2 Buku-buku tentang makro Ekonomi Islam

##### 3.4.2.3 Kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek.

---

<sup>38</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka cipta: 2006), h. 87.



- 3.5.1 Metode observasi langsung yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang terjadi. Pengamatan dan fenomena itu dikhususkan pada masalah apakah bentuk penanggulangan itu dibolehkan atau tidak menurut ekonomi Islam.
- 3.5.2 Metode wawancara yaitu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide (panduan wawancara)*.<sup>39</sup>
- 3.5.3 Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian dilapangan.<sup>40</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara dalam menganalisis data yang telah diperoleh diantaranya sebagai berikut:

#### 3.6.1 Analisis induktif

Analisis induktif ialah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan umum.

#### 3.6.2 Analisis deduktif

---

<sup>39</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, ( Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia: 2005 ), h. 11-12.

<sup>40</sup> Masyhuri dan Zainudin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, h. 30.

Dalam menganalisis data yang digunakan Analisis deduktif yaitu cara berpikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari observasi dan wawancara yang didapatkan dilapangan, setelah itu data akan dibaca dan diamati secara mendalam, analisis data dilakukan ketika peneliti menemukan data dilapangan, data tersebut dianalisa sesuai dengan rumusan masalah.



---

<sup>41</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. Ke II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Letak Geografis

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kecamatan Soreang Kota Parepare, dimana kota Parepare adalah sebagai simpul atau persimpangan penghubungan darat yang menghubungkan kota Makassar sebagai pusat atau ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan juga berfungsi sebagai pintu gerbang laut antara wilayah pedalaman bagian Utara dan Tengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara geografis wilayah Kota Parepare terletak disebelah Barat bagian Tengah Provinsi Sulawesi Selatan ( $\pm$  155 km di Utara Kota Makassar). Adapun batas wilayahnya sebagai berikut:

- 4.1.1.1 sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.
- 4.1.1.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- 4.1.1.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- 4.1.1.4 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap.

Di kotaParepare terdapat 3 (tiga) macam angin yaitu:

- 4.1.1.1 Angin Muson Barat : November – April
- 4.1.1.2 Angin Muson Timur : Mei – Oktober
- 4.1.1.3 Angin Muson Pancaroba : Maret - Deseember

Kecamatan Soreang merupakan salah satu dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Parepare yang secara rinci mempunyai batasan-batasan administrasi sebagai berikut:

4.1.1.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

4.1.1.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Parepare

4.1.1.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung

4.1.1.4 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

Kondisi tanah di Kecamatan Soreang sebagian subur dan sebagian kurang produktif, disebabkan tanah pantai yang semakin meluas akibat endapan sungai-sungai yang berfungsi sebagai batas wilayah antara Kota Parepare dengan Kabupaten lainnya serta berbagai saluran pembuangan air.

Kecamatan Soreang berada di Sebelah Utara dan sebagian wilayahnya berada pada di pusat Kota Parepare merupakan salah satu dari empat Kecamatan yang ada di Kota Parepare dengan luas wilayah 8,33 ha dan berda pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi, rata-rata temperature di Kecamatan Soreang Kota Parepare sepanjang tahun 2009 bsekitar 28,5 °C, dengan suhu minimum 25,6 °C dan suhu maksimum 31,5 °C. Curah hujan 300 mm/bulan antara bulan November-Mei dan musim kemarau bulan Juni-Okttober dan kecepatan angin rata-rata mencapai 10 sampai 20 km per jam.

**PEMBAGIAN LUAS WILAYAH DI KECAMATAN SOREANG KOTA  
PAREPARE**

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Soreang

No	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah	
			RW	RT
1	Lakessi	0,15	5	15
2	Ujung Soreang	0,48	9	23
3	Watang Soreang	0,65	6	20
4	Kampung Pisang	0,12	8	18
5	Ujung Lare	0,18	5	15
6	Bukit Indah	0,19	11	31
7	Bukit Harapan	5,56	9	27
<b>Jumlah</b>		<b>8,33</b>	<b>51</b>	<b>149</b>

Sumber Data: Kantor Kecamatan Soreang

Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah wilayah dan luas di Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu dengan luas 8,33, jumlah RT 51 dan jumlah RW 149.

#### 4.1.2 Demografi

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan disuatu wilayah tidak dapat terlepas dari keadaan demografisnya karena tanpa adanya penduduk, maka tidak akan berjalan kegiatan pemerintahan. Penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan dan pelayanan di suatu daerah. Untuk itu perkembangan dan pertumbuhan penduduk harus senantiasa diikuti dan diperhatikan sehingga akan dapat menunjang kegiatan pemerintahan.

Penduduk merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya program-program pemerintah. Penduduk dituntut untuk berprestasi dan berperan aktif dalam mensukseskan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, penduduk merupakan objek dalam pembangunan.

## LAPORAN JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN SOREANG KOTA

### PAREPARE

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Soreang bulan januari 2015

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Lakessi	1410	1520	2930
2	Kampung Pisang	1870	1906	3776
3	Ujung Baru	2103	2863	4966
4	Ujung Lare	2057	2356	4413
5	Watang Soreang	2747	2754	5501
6	Bukit Indah	4867	5132	9999
7	Bukit Harapan	4054	4080	8134
	<b>JUMLAH</b>	<b>19108</b>	<b>20611</b>	<b>39719</b>

Sumber Data: Kantor Kecamatan Soreang

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk di Kecamatan Soreang pada bulan januari tahun 2015 adalah laki-laki 19108 orang, perempuan 20611 orang dan jumlah keseluruhan antara laki-laki dan perempuan 39719 orang.

#### 4.2 Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Kota Parepare sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dan masyarakat umum.

Strategi penanggulangan pengangguran di Kecamatan Soreang bukan hanya semata-mata dilakukan oleh pemerintah daerah di kecamatan Soreang sendiri. Penanggulangan pengangguran justru lebih banyak dirancang oleh pemerintah kota Parepare, Kecamatan hanya bertindak sebagai fasilitator. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Lahasang yang ditemui penulis di Kantor Camat Soreang sebagai berikut:

“Kebanyakan strategi penanggulangan pengangguran ini langsung dari pemerintah kota Parepare dan diberlakukan untuk umum ke seluruh kecamatan yang berada di kota Parepare. Kami hanya bertindak sebagai fasilitator.”<sup>42</sup>

Berikut strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran di Kecamatan Soreang Kota Parepare:

#### 4.2.1 Proses Penentuan Rencana

Visi dan misi pembangunan kota Parepare adalah pondasi dalam proses penentuan rencana pemerintah daerah dalam penanggulangan pengangguran. Visi dan misi yang dimaksud adalah:

4.2.1.1 Visi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah, “Terwujudnya Kota Parepare yang *Maju, Peduli, Mandiri* dan *Bermartabat*” yang memiliki makna:

4.2.1.1.1 *Maju*, mengandung arti: mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau

---

<sup>42</sup> Lahasang, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Soreang Kota Perpare, wawancara di Kantor Camat Sorean g pada Tanggal 26 November 2015.

bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.

4.2.1.1.2 *Peduli*, mengandung arti: mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.

4.2.1.1.3 *Mandiri*, mengandung arti: mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

4.2.1.1.4 *Bermartabat*, mengandung arti: harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagaisendi kehidupan.

Visi yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare untuk melaksanakannya.

4.2.1.2 Misi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah :

4.2.1.2.1 Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.

4.2.1.2.2 Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2.3 Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.



4.2.1.2.4 Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.

4.2.1.2.5 Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.<sup>43</sup>

Pemerintah Kota Parepare sebagai suatu organisasi telah menyusun dan menetapkan kembali beberapa lembaga/ instansi otonom berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* oleh karena itu agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* yang baik dapat terwujud jika ada koordinasi dan integritas yang baik pada penyelenggara negara, profesional serta etos kerja dan moral tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme yang meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas perlemen, serta keterbukaan akses informasi bagi masyarakat.

---

<sup>43</sup> LAKIP Kota Parepare 2015

Perangkat Daerah Kota Parepare meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. Perangkat Daerah sangat diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban tersebut adalah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). SAKIP dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk tingkat pemerintah daerah dan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya RPJMD/RENSTRA dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Parepare, khususnya seluruh SKPD dalam menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD sesuai tugas pokok dan fungsi setiap SKPD.

#### **4.2.2 Tujuan dan Sasaran**

Pemerintah Daerah Kota Parepare menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan misi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-

2018 tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Rencana Penanggulangan Pengangguran sebagai berikut :

4.2.2.1 *Misi Pertama*: Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan dengan tujuan:

4.2.2.1.1 Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas dengan sasaran: Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.

4.2.2.1.2 Pemerataan layanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat dengan sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

4.2.2.2 *Misi Kedua*: Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tujuan:

4.2.2.2.1 Akselerasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkesinambungan dengan Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

4.2.2.2.2 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan Sasaran: Meningkatnya ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau.

4.2.2.3 *Misi Ketiga*: Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup dengan tujuan: Akselerasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup.

#### **4.2.3 Upaya Mencapai Tujuan**

Untuk mencapai tujuan dari perencanaan, upaya yang dianggap paling efisien dalam penanggulangan pengangguran adalah Perjanjian Kinerja Tahunan. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah :

- 4.2.3.1 Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 4.2.3.2 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
- 4.2.3.3 Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4.2.3.4 Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 4.2.3.5 Sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) atau sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Parepare dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui berbagai sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perjanjian Kinerja Tahun 2015, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2015
1.	Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.	1.1 Angka Melek Huruf 1.2 Angka Rata-rata Lama sekolah	97,50% 10,93 Tahun

2.	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.	2.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	8,09% - 8,59%
		2.2 Pendapatan perkapita	Rp. 22.582.335
		2.3 Tingkat kemiskinan	5,25% - 5,75%
		2.4 Penduduk diatas garis kemiskinan	65,78%
		2.5 Tingkat partisipasi angkatan kerja	3,85%
		2.6 Tingkat pengangguran terbuka	
3.	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	80%

Sumber: LAKIP Kota Parepare Tahun 2015

No	Program-program Prioritas	Anggaran
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 225.000.000
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 19.364.694.525
3.	Program Pendidikan Menengah	Rp. 11.113.308.400
7.	Program Pendidikan Non Formal	Rp. 339.000.000
8.	Program Peningkatan Sarana Perekonomian Daerah	Rp. 41.999.600
9.	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah	Rp. 78.075.000
10.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi	Rp. 181.000.000

	UMKM		
11.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp.	130.000.000
12.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	203.500.000
13.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp.	285.000.000
14.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	506.072.500
15.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.	105.000.000
16.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	156.000.000
17.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp.	2.127.842.250
18.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp.	388.609.000
19.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp.	294.000.000
20.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Rp.	4.601.808.450
21.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa	Rp.	362.486.000
22.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Rp.	3.384.734.500
23.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.295.043.750

Catatan : Target Anggaran telah disesuaikan dengan Perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2015

Islam di antara agama lain yang ada di dunia, adalah satu-satunya agama yang menjunjung tinggi nilai kerja keras. Islam menekankan bahwa apa yang didapat oleh seseorang adalah sesuai dengan jerih payah. Siapa yang lebih banyak pekerjaannya (amalnya) akan mendapatkan hasil atau pahala yang lebih besar. Berwirausaha itu harus mau menerima tanggung jawab penuh atas kinerja perusahaannya, Pengusaha perseorangan harus mau bekerja tanpa mengenal waktu, mereka dan berkomunikasi dengan baik kepada pekerjanya.<sup>44</sup>

Dalam sistem kenegaraan yang menerapkan Syariah Islam, kepala negara (Khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam.

Mekanisme yang dilakukan oleh Khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme. *Pertama*, Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah, serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Banyak nash al-Quran maupun as-Sunnah yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja. Misalnya, firman Allah s.w.t. dalam QS al-Mulk/67 ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

Terjemahan:

<sup>44</sup> Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hal. 35

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.<sup>45</sup>

Jelas, Islam mewajibkan kepada individu untuk bekerja. Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja maka Khalifah berkewajiban untuk memaksa individu bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya, termasuk di dalamnya pendidikan. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal. Saat itu beliau berkata, “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian. *Kedua*, Khalifah melakukan sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran, yakni menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan, menyediakan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, dan harus berpihak kepada pengusaha maupun buruh secara adil.<sup>46</sup>

Berdasarkan ulasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah merancang strategi penanggulangan pengangguran dalam bingkai Khilafah Islamiyah sebagaimana dalam QS. Al Mu'minuun/23 ayat 8-11:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾  
أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

”dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka Itulah

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 956

<sup>46</sup> *Lajnah Khusus Intelektual DPD 1 HTI Jawa Timur, Bunga Rampai Pemikiran Intelektual Muslim Seputar Syariah dan Khilafah* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 146



orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.”<sup>47</sup>

### **4.3 Pelaksanaan Penanggulangan Pengangguran di Kecamatan Soreang Kota Parepare**

#### **4.3.1 Peningkatan Daya Saing (Ilmu dan Pengetahuan) Masyarakat.**

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterbatasan biaya bagi anak yang kurang mampu, membuat pendidikan di negara ini menjadi suatu masalah yang cukup kompleks. Dibutuhkannya peran dari pemerintah dalam membangun pendidikan.

Peningkatan Daya Saing (Ilmu dan Pengetahuan) ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya nyata dalam mewujudkan Misi Pertama dalam RPJMD Kota Parepare yaitu “Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan” dengan tujuan di bidang pendidikan adalah “Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas”. Dinas Pendidikan Kota Parepare memegang peranan yang utama dalam pencapaian sasaran ini.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Peningkatan Daya Saing (Ilmu dan Pengetahuan) yaitu:

- 4.3.1.1 Adanya kebijakan nasional tuntas buta aksara
- 4.3.1.2 Intervensi Pemerintah daerah melalui program wajib belajar 12 tahun
- 4.3.1.3 Dukungan biaya operasional PKBM melalui Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan.
- 4.3.1.4 Perluasan akses layanan pendidikan formal melalui BOP, BOS dan Pendidikan gratis.

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.342

4.3.1.5 Adanya pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu

4.3.1.6 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah

4.3.1.7 Meningkatnya rasio ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan

Sebelumnya Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan program transportasi gratis bagi siswa di seluruh sekolah di Parepare. Yang anggarannya bersumber dari BOS. Program ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya siswa putus sekolah karena kendala ekonomi.

Selain program transportasi gratis, guna lebih mendorong akselerasi kemajuan di bidang pendidikan, pemerintah kota juga menyiapkan beasiswa untuk siswa berprestasi dan siswa kurang mampu hingga ke tingkat perguruan tinggi. Pemerintah juga tengah mengkaji pemberian bantuan penyelesaian studi seluruh mahasiswa Parepare semester akhir. Sebagaimana ungkapan orang tua siswa penerima beasiswa sebagai berikut:

“Sekarang enak skalimi kasi sekolah anak-anak karna biar ongkos pete-pete dibayarkan juga sama pemerintah. Lainpi lagi beasiswanya. Rugi mentong itu orang tua kalau tidak na kasi sekolah anaknya”<sup>48</sup>

Pernyataan dari orang tua siswa yang lain mengemukakan pendapat yang sama yaitu sbagai berikut:

“Bersyukur sekaligus kasian karna adami beasiswa dari pemerintah. Seandainya nda ada beasiswa nda saya kasi sekolahmi itu anakku. Karna dari manaki kasian carikan pembayaran.”<sup>49</sup>

Pelaksanaan program-program pembangunan menurut urusan wajib danurusan pilihan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun2013-2018.

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Pendidikan sebagaipelaksana urusan ini sebesar Rp. 265.181.350.925,00,- dengan realisasiRp.238.870.247.579,-

<sup>48</sup> Masna, ibu rumah tangga di Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Bukit Harapan 26 November 2015.

<sup>49</sup> Iping, Nelayan di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Cempae 26 November 2015.

atau 90,08 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, antara lain :

4.3.1.1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya pemberian beasiswa berprestasi kepada 34 siswa SD dan 34 siswa SMP dan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu kepada 313 siswa SD dan 255 siswa SMP.

4.3.1.2 Program Pendidikan Menengah yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya penyelenggaraan program pendidikan gratis dengan sasaran 3.750 siswa SMA, 3.955 siswa SMK dan 836 siswa MA.

Berdasarkan data Desember 2015, Pemerintah Kota memberikan beasiswa kepada 300 siswa kurang mampu, serta membagikan pakaian seragam sebanyak 800 lembar kepada siswa SD dan SMP yang kurang mampu

Beasiswa untuk SD senilai Rp. 350.000 per siswa dan untuk tingkat SMP senilai Rp. 500.000 per siswa. Dan kedepannya akan lebih ditingkatkan.

Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan umat manusia. Perubahan sosial bisa terjadi jika masyarakat itu terdidik. Melalui pendidikan manusia dapat mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan dengan benar dan baik. Secara teoritis, ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia tidak mungkin dimilikinya tanpa melalui proses pendidikan.

Setiap insan berhak memperoleh pendidikan, tanpa mengenal ras, suku bangsa, agama maupun kondisi pribadi, fisik dan ekonominya. Seperti dalam QS. 'Abasa/80 ayat 1-3 yang menyebutkan:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۚ

Terjemahan:

“Dia (Muhammad ) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa.”<sup>50</sup>

Orang buta itu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah s.a.w. meminta ajaran-ajaran tentang Islam; lalu Rasulullah s.a.w. bermuka masam dan berpaling daripadanya, karena beliau sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam. Maka turunlah surat ini sebagai teguran kepada Rasulullah s.a.w.

Berdasarkan penjelasan diatas. Maka, strategi pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan dalam menanggulangi pengangguran sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, dimana pemerintah ingin meningkatkan mutu pendidikan bagi siswa yang kurang mamampu melalui beberapa pelayanan dan motivasi agar mereka dapat menikmati pendidikan seperti yang didapatkan oleh siswa dari keluarga yang mampu.

#### **4.3.2 Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat**

Misi kedua yang ditetapkan dalam RPJMD adalah “Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan misi tersebut telah ditetapkan sasaran strategis Maningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.

Dalam mencapai sasaran ini, pemerintah telah melaksanakan program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 1024

#### 4.3.2.1 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang adadi Daerah.

Semakin maju suatu daerah, semakin banyak pula jenis keterampilan yang ditekuni masyarakatnya, seperti keterampilan mendesain bangunan, keterampilan memahat, mengembangkan agro pertanian, agro bisnis, kelautan, dan lain sebagainya. Keterampilan yang banyak itu dipengaruhi oleh bakat, pembawaan, lingkungan serta iklim tempat seseorang berdomisili.

Berdasarkan data tahun 2015, telah digelar pembinaan di kecamatan Soreang Kota Parepare. Maksud dan tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk memberikan suatu bekal keterampilan terhadap masyarakat kecamatan Soreang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber sebagai berikut:

“Saya ini tamatan SMP ji. Sekarang susahmi cari kerja karna kebanyakan pake ijazah sekolah tinggi-tinggi. Kemarin sempat ikutka pelatihan masak sama bikin kerajinan. Inimi saya jual na ada-adami seikit penghasilan. Lumayan to bisa dipake beli keperluan dapur.”<sup>51</sup>

Dengan terbentuknya kelompok kerja di masyarakat, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta mampu menciptakan inovasi baru yang memiliki daya saing di pasaran. Misalnya membuat kerajinan tangan atau kuliner berupa makanan khas yang dikemas lebih modern dan higienis

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare, H Gustam Hakim mengatakan, “untuk menanggulangi jumlah pengangguran dan pencari kerja, telah dibentuk kelompok kerja di masyarakat dan memberi keterampilan berbentuk pelatihan-pelatihan. Saat ini, berbagai macam produksi masyarakat Kota Parepare yang diciptakan melalui kegiatan Kelompok Kerja. Sudah banyak kelompok kerja di

<sup>51</sup>Sarina , warga Cempae Kecamatan Soreang, *wawancara* di Cempae 5 Desember 2015.

masyarakat yang dibentuk, bahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) di Kota Parepare mereka telah melakukan berbagai pelatihan, agar masyarakat menjadi SDM yang unggul dan mampu bersaing di dunia kerja.<sup>52</sup>

Guna menekan angka pengangguran di Kota Parepare khususnya di Kecamatan Soreang, diperlukan banyak lapangan kerja baru. Salah satu yang dapat membantu saat ini adalah membentuk kelompok-kelompok kerja

Pengelolaan anggaran ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5.193.421.950,- dengan realisasi anggaran Rp.4.998.641.614,- atau 96,24 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

4.3.2.1.1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pelatihan pembuatan Souvenir dari kerang-kerangan dan aneka kuliner dari hasil laut sebanyak 25 orang di Cempae Kel. Wattang Soreang

4.3.2.1.2 Program peningkatan kesempatan kerja yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dengan capaian tersedianya informasi lowongan pekerjaan bagi pencari kerja di 150 perusahaan. Jumlah pencari kerja sebanyak 815 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 651 orang.

4.3.2.2 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

---

<sup>52</sup>Majid Aqram, *Tekan Angka Pengangguran melalui Kelompok Kerja*, Parepos, <http://parepos.co.id/ekonomi/item/7206-tekan-angka-pengangguran-melalui-kelompok-kerja>, 18 Januari 2016

Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran yakni terlampau banyaknya tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal. Sehingga ketika seseorang kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal. Justru orang-orang yang kurang berpendidikan bisa melakukan inovasi menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha.

Pengelolaan anggaran dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.514.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp.454.530.700,- atau 88,34 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- 4.3.2.2.1 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan klaster bisnis UKM berdasarkan jenis produk yaitu klaster meubel, klaster pangkaraman ikan, klaster kuliner kue tradisional dan klaster batubata.
- 4.3.2.2.2 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dilaksanakan dalam kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi dengan capaian penerbitan sertifikat penilaian kesehatan koperasi terhadap kondisi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi

Menghadapi pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi Asean/MEA) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare mengadakan pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan di Cempae. Masyarakat Pesisir di daerah tersebut mulai membangun UMKM. Berbagai jenis usaha kerajinan tangan diproduksi, seperti tempat lampu hias serta hiasan rumah yang terbuat dari bahan cangkang kerang.

Menurut Bagian Pengantar Kerja Disnaker Kota Parepare Marlina Agus Mante mengatakan bahwa, “dengan pelatihan secara intensif seperti yang dilakukan di daerah Cempae kecamatan Soreang Kota Parepare akan mampu menghasilkan produk inovasi terbaru yang mampu bersaing dengan produk asing.”<sup>53</sup>

#### 4.3.2.3 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Peningkatan program pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif tidak hanya sebatas pemberian bantuan tetapi perlu diikuti dengan pendampingan, bantuan manajemen usaha dan pembukaan akses bagi usaha mikro untuk mendapatkan fasilitas modal dari perbankan.

Program yang dijalankan Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan wirausaha di Kota Parepare termasuk di Kecamatan Soreang , yakni dengan mengadakan Gebyar Perizinan Gratis yang digelar di Kantor Perizinan Satu Atap (SINTAP) Parepare, tercatat 230 UKM yang mendapat SIUP baru. Kegiatan ini merupakan program Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) bekerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan bagi setiap UKM yang ada di Kota Parepare sehingga dengan adanya program gratis ini, UKM bisa mendapatkan modal bantuan dari Bank . Kepala Kantor Perizinan Satu Atap (SINTAP), Julius Upa mengatakan, "Izin memang diperlukan untuk mengembangkan UKM, demi kemajuan perekonomian di Parepare.”<sup>54</sup>

Salah satu usaha pemerintah dalam membantu pelaku usaha juga dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan Kredit yang diberikan pemerintah kepada segmen mikro/kecil, menengah dan koperasi yang layak untuk modal kerja

---

<sup>53</sup> Rahmaniar, *Hadapi MEA DISNAKER Latih Warga Pesisir*, Parepos<http://parepos.co.id/ekonomi/item/7124-hadapi-mea-disnaker-latih-warga-pesisir>, 18 November 2015

<sup>54</sup>Julius Upa, Kepala Kantor Perizinan Satu Atap (SINTAP) Parepare, *wawancara* 16 Desember, 2015



atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit. Sebenarnya dengan program ini diharapkan rakyat miskin dapat lebih mandiri dan menjalankan usahanya.

Allah SWT melarang berputarnya harta (modal) hanya dikalangan orang-orang kaya saja. aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah, yang notabene adalah mayoritas penduduk di suatu daerah atau Negara. Dalam QS. Al Hasyr/59 ayat 7 menyebutkan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahan:

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”<sup>55</sup>

#### 4.4 Hasil Penanggulangan Pengangguran oleh Pemerintah Daerah di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka pengangguran pada tahun 2015 di Kota Parepare menurun. Ini menjadi acuan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare.

Julius Upa, Kepala Kantor Perizinan Satu Atap (SINTAP) Parepare mengatakan, “Data tersebut terlihat angka pengangguran di tahun 2014 sekitar 6.610

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h.916

orang, sedangkan di tahun 2015 sisa 4.116 penganggur. Artinya dari data tersebut terlihat penurunan angka penganggur sekitar 2.444 orang atau sekitar 24 persen dalam kurun waktu setahun.”<sup>56</sup> Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dan semua pihak terkait.

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Capaian kinerja ARLS cukup mengembirakan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 capaiannya sebesar 9,89 tahun dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 9,95 tahun. Tren peningkatan ini kembali terjadi pada tahun 2015 sebesar 10,03 tahun, namun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 10,53 tahun sehingga capaian kinerjanya sebesar 91,77%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018 (target RPJMD) sebesar 12 tahun berarti capaiannya hanya 83,58%. Dengan memperhatikan hasil ini, maka perlu perhatian yang ekstra tinggi dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan untuk mengakselerasi program-program pembangunan pendidikan dan harus didukung oleh sektor-sektor lainnya.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Daya Saing (Ilmu dan Pengetahuan) Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2015			Target RPJMD Tahun 2018
		Tahun 2013	Tahun 2014	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,95	10,93	10,03)*	91,77	12,00

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare

*Ket :\*) = Angka sementara*

Sumber: LAKIP Kota Parepare tahun 2015

BOS dan pemberian beasiswa merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan bagi satuan pendidikan agar putra putri bangsa setelah menjadi angkatan kerja memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan sebagai pekerja

Pengadaan beasiswa bagi anak yang kurang mampu cukup berhasil dan membantu masyarakat kecamatan soreang unuk tetap melanjutkan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber sbagai berikut:

“Saya kerjaku jualan eceran beginiji. Bapaknya anak-anak kerja jadi tukang bersih-bersih. Tapi Alhamdulillah bisaji kasian sekolah anakku berkat beasiswa dari pemerintah. Itumi selalu kumarahi anakku kalau malas-malas pergi sekolah na tidak adami juga dibayar. Mudah-mudahan selaluji ada beasiswa seperti ini supaya bisa tetap sekolah ini anak-anak kasian supaya dapat kerja yang bagus nanti. Jangan seperti kita ini orang tuanya yang susah.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pengadaan beasiswa cukup membantu masyarakat yang kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di masa yang akan datang.

Keberhasilan juga terlihat pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hingga triwulan 2015 ini, SINTAP telah menerbitkan 720 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk UKM kota Parepare termasuk Kecamatan Soreang. Kepala Kantor SINTAP, Julius Upa, mengatakan, ”Pertumbuhan ekonomi UKM di Parepare sangat pesat. Setiap tahun tumbuh mencapai 100-an. Sedangkan data

---

<sup>57</sup> Nursia, warga Jl. Amal Bakti, *Wawancara* di Bukit Harapan tanggal 4 Februari 2015

lengkap UKM yang ada di Parepare ada pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Parepare.”<sup>58</sup>

Pendapatan per Kapita dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Tercatat pada tahun 2013 sebesar Rp. 29.132.602, meningkat menjadi Rp. 32.344.408 pada tahun 2014. Pada tahun 2015, PDRB atas harga berlaku mencapai (juta Rp) 4.978.449 dengan jumlah penduduk 138.627 jiwa sehingga pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp. 35.912.434, jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp. 22.582.335. Jika dibandingkan dengan target RPJMD di Tahun 2018 sebesar Rp. 27.167.266, juga telah terlampaui dengan capaian kinerja 132,19% yang secara langsung berpengaruh besar terhadap Kecamatan Soreang yang merupakan Kecamatan di Kota Parepare dengan jumlah penduduk terbanyak.

Allah SWT telah memberikan nikmat-Nya kepada manusia, telah memberikan rezeki dan karunia-Nya, telah meneguhkan kekuasaan untuk mereka di muka bumi dan telah menjadikan mereka khalifah-Nya. Semua ini diberikan Allah kepada manusia sebagai ujian dan cobaan dengan tujuan untuk menilai mereka apakah mereka mau bersyukur atau malah kufur.

Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat sedikit atau besar yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, tidak juga sebaliknya mengubah kesengsaraan yang dialami oleh suatu kaum menjadi kebahagiaan hingga kaum itu sendiri terlebih dahulu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, yakni untuk memperoleh nikmat tambahan mereka harus lebih baik, sedangkan perolehan siksaan adalah akibat mengubah fitrah kesucian mereka menjadi keburukan

---

<sup>58</sup>Amri Said, SINTAP Terbitkan 720 SIUP hingga Triwulan 2015  
[http://maftarta.go.id/kominfo/files/data\\_ukm/terbitkan\\_720\\_siup](http://maftarta.go.id/kominfo/files/data_ukm/terbitkan_720_siup), 14 Desember 2015

dan kedurhakaan dan sesungguhnya Allah Maha mendengar apapun yang disuarakan makhluk lagi maha mengetahui apapun sikap dan tingkah laku mereka. Dalam QS. Ar-Ra'd/13 ayat 11 menyebutkan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”<sup>59</sup>

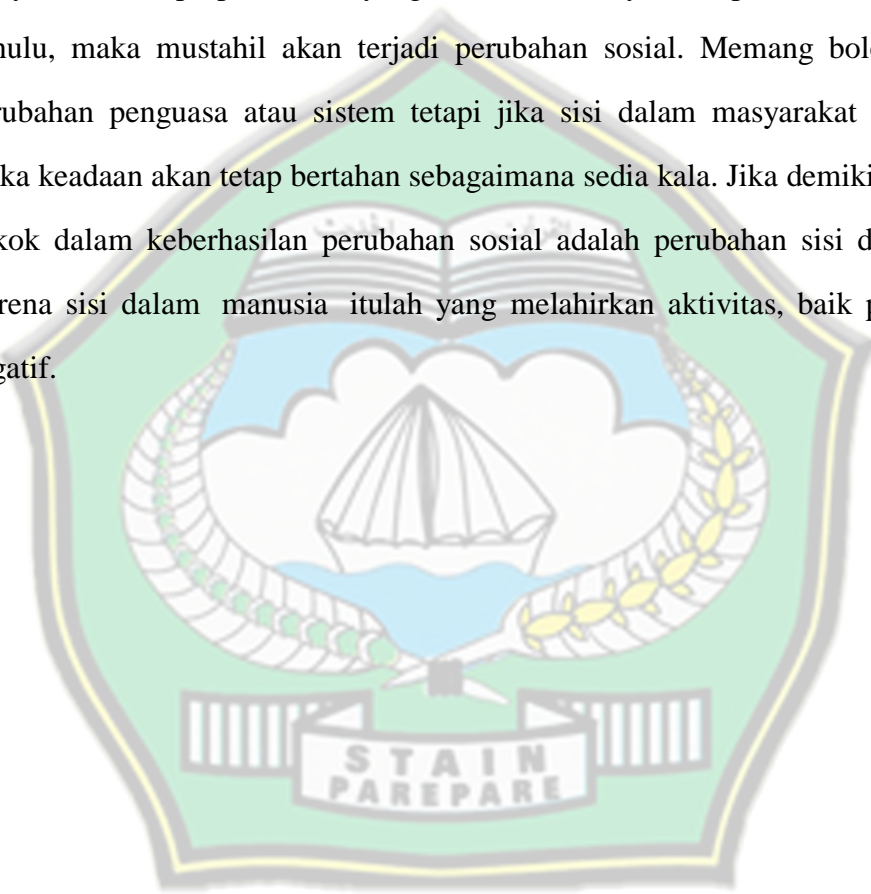
Ayat tersebut berbicara tentang perubahan nikmat, menggunakan kata ما “ma” sehingga mencakup perubahan apapun, yakni baik dari nikmat positif menuju nikmat negatif maupun dari negatif ke positif.

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut ayat di atas. *Pertama*, ayat di atas berbicara tentang perubahan sosial yang berlaku bagi masyarakat yang lalu, masakini, dan masa mendatang. Keduanya berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan, bukan menyangkut orang perorang atau individu. Ini dipahami dari penggunaan kata kaum/masyarakat pada kedua ayat tersebut. Karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. *Kedua*, ayat di atas berbicara tentang kaum, maka ini berarti bahwa ketetapan atau sunnatullah yang dibicarakan ini berkaitan dengan kehidupan duniawi, bukan ukhrawi. Hal ini mengantar kita berkata bahwa ada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi, dan ini akan terjadi di akhirat kelak.

Perubahan yang terjadi akibat campur tangan Allah atau yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan apa menyangkut banyak hal seperti kekayaan dan

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h.370

kemiskinan, kesehatan , dan penyakit, kemuliaaan atau kehinaan, persatuan atau perpecahan, dan lain-lain yang berkaitan dengan masyarakat secara umum bukan yang secara individu. Jika demikian, bisa saja ada diantara anggota masyarakat yang kaya, tetapi tidak mayoritasnya miskin maka masyarakat tersebut dinamai masyarakat miskin demikian seterusnya. Kedua ayat ini menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah, haruslah didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat. Tanpa perubahan yang dilakukan masyarakat pada diri mereka terlebih dahulu, maka mustahil akan terjadi perubahan sosial. Memang boleh saja terjadi perubahan penguasa atau sistem tetapi jika sisi dalam masyarakat tidak berubah, maka keadaan akan tetap bertahan sebagaimana sedia kala. Jika demikian yang paling pokok dalam keberhasilan perubahan sosial adalah perubahan sisi dalam manusia. Karena sisi dalam manusia itulah yang melahirkan aktivitas, baik positif maupun negatif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Setelah melakukan penelitian di kecamatan Soreang kota Parepare serta untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dalam Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare) sebagai berikut adalah:

- 5.1.1 Walikota bersama Perangkat Daerah Kota Parepare meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Karenanya, jika strategi ini dilihat dalam perspektif Ekonomi Islam, maka strategi ini dibolehkan dalam Ekonomi Islam karena pemerintah daerah telah merancang strategi penanggulangan pengangguran dalam bingkai Khilafah Islamiyah.
- 5.1.2 Pemerintah telah mengupayakan peningkatan daya saing (ilmu pengetahuan) masyarakat melalui program wajib belajar 12 tahun, Perluasan akses layanan pendidikan formal melalui BOP, BOS, Pendidikan gratis dan pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dilaksanakan dengan rogram Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah, Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, serta Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM. Karenanya, jika upaya ini dilihat dalam perspektif Ekonomi Islam, maka upaya ini dibolehkan karna dalam Ekonomi Islam perputaran harta (modal) tidak hanya dikalangan

orang-orang kaya saja, tetapi juga hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah, yang notabene adalah mayoritas penduduk di suatu daerah atau Negara.

- 5.1.3 Berbagai upaya penanggulangan pengangguran telah berhasil direalisasikan oleh pemerintah sehingga Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani meningkat sebesar 10,03 tahun dan Pendapatan per Kapita dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Karenanya, jika dilihat dalam perspektif Ekonomi Islam, maka hal ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, dimana pemerintah sebagai kepala daerah (Khalifah) telah memberikan hasil positif bagi masyarakatnya sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang patut diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Diharapkan kedepannya lebih memperbanyak lagi buku-buku bacaan tentang perilaku konsumsi, peneliti merasa hal ini sangat penting untuk menambah bahan bacaan dan pengetahuan untuk para mahasiswa-mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) karena ini sangat berkaitan dengan Ekonomi.
- 5.2.2 Bagi masyarakat bertujuan agar dapat membantu upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan bersama karna dalm upaya penanggulangan pengangguran, pemerintah dan masyarakat saling membutuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2011. *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Bustamin, 2007. *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-‘Adawy Musthafa,, 2005. *Fikih Akhlak*, Jakarta: Qisthi Press.
- Aziziy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin. 2000. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiman, Ahmad Nasir dan Mujibah Utami, 1998. *Islam Sifat, Prinsip Dasar dan Jalan Menuju Kebenaran*. Cet 1; Yogyakarta: Dana Bhakti Prima
- Chapra, Umer. 2003. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani.
- Edwin Nasution, Mustafa. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Haider Navqi, Nawab. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Adam. 2009. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pengangguran (Studi Kasus di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi)*, Yogyakarta (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Kecamatan Soreang, *Data Kecamatan Soreang di ambil penulis dari dokumentasi yang ada di Kantor Kecamatan Soreang Kota Parepare*, (9 November 2015)
- Machasin, 2003. *Islam Teologi Aplikatif*. Cet. ISleman-Yogyakarta: Pustaka Alief
- Mannan, Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*, Jakarta: Revika Aditama.
- Muana Nanga. 2005. *Makro Ekonomi Teori Masalah dan Kebijakan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Al-Assal Ahmad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Muin M Abd.Dkk, 2007. *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Umat*, Jakarta Pusat: CV. Prasasti

- Naqvi, Syed Nawab Haider, 2003. *Islam, Economics, and Society*, diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin dengan judul *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam*. Cet. 1; Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Nasir, Moh.2005. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- P3EI. 2012. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. 1992. *Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016, LAKIP Kota Parepare Tahun 2015
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Cet. Ke-4; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Qardawi, Yusuf, 1997. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami* diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet.1; Jakarta: Gema Insani
- Rosyidi, Suherman, 2003. *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro)*.Cet.VII; Jakarta: Grafindo Persada
- Sakti, Ali, 2007. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Cet 1; Katalog Perpustakaan Nasional Dalam Terbitan (KDT).
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1996. *The Economic Enterprise*, diterjemahkan oleh Anas sidik, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Cet. Ke-2; Jakarta: Bumi Aksara
- Subagyo, Joko.2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*,Jakarta: Rineka cipta.
- Sudarsono, Heri, 2002. *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*. Ed.1. Cet.3; Yogyakarta: Ekonosia
- Sukirno, Sadono.2004. *Makro Ekonomi Teori Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.1, hal.4
- Tim Penyusun.2013.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah dan Skripsi*,Parepare: STAIN Parepare.
- Triono, Dwi Condro.2012. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, Jakarta: Irtikas.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare
- Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Parepare
- <http://cupcakecha.blogspot.com/2014/02/masalah-pengangguran-dan-teori-migrasi.html>



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 08 Kec. Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: info@stainparepare.ac.id

Nomor : Sti.19/PP.00.9/ 2015 /2015  
Lamp. :-  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian  
Kepada Yth  
Kepala Daerah KOTA PAREPARE  
di  
PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare :

Nama	: NISAR
Tempat / Tgl. Lahir	: PINRANG, 18 Juni 1993
N I M	: 11.2200.079
Jurusan / Prodi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Alamat	: MATTIRO BULU KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
"STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN; PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE)"  
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober 2015** sampai selesai.  
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.  
Terima kasih.

Parepare, 12 Oktober 2015  
A.n Ketua  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga



Drs. Muth. Djunaidi, M.Ag.  
NIP. 195412311991031032



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ganggawa No. 5 Parepare, Telp. (0421) 24920 Fax. (0421) 24920 Parepare  
 Kode Pos 91111, Email : [kesbang@pareparekota.go.id](mailto:kesbang@pareparekota.go.id) Website : .....

Nomor : 070/1054/BKBP  
 Lampiran : ---  
 Perihal : **Izin Penelitian.-**

Parepare, 12 Oktober 2015  
 Kepada  
 Yth. **1. Kepala BPS Kota Parepare**  
**2. Camat Soreang Kota Parepare**  
 Di - **Parepare**

- D A S A R :**
1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  2. UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  3. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
  4. Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.
  5. Surat Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga STAIN Parepare Nomor : St.19/PP.00.9/2039/2015 Tanggal 12 Oktober 2015. Perihal Permohonan/Rekomendasi Izin Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

**N a m a** : **NISAR**  
**Tempat/Tgl Lahir** : Pinrang, 18 Juni 1993  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**A l a m a t** : Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian / Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :  
**“ STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN;  
 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
 (STUDI DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE)“**

**Selama** : Tmt. 12 Oktober s/d 25 Desember 2015  
**Pengikut / Peserta** : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Jawatan Badan yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati semua Per Undang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil **“Penelitian”** kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare)
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya,-

a.n. **KEPALA** BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA PAREPARE  
 Sekretaris  
  
**DESHA ULFA MUSA, M.Si.**  
 Pangkat Pembina Tk. I  
 Nip. 196704181994031005

**TEMBUSAN :** Kepada Yth,  
 1. Gubernur Prov. Sul Sel Cq. Kepala BKB Sul Sel di Makassar  
 2. Walikota Parepare di Parepare  
 3. Ketua STAIN Kota Parepare di Parepare



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Telepon 25694 Parepare 91132

**SURAT IZIN**

Nomor: 800 - 259/ KCS

Dasar : Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 070/1054/BKBP,  
Tanggal 12 Oktober 2015, Perihal : Izin Penelitian.

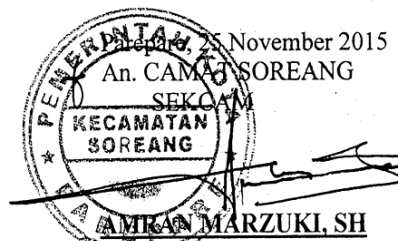
**MEMBERI IZIN**

Kepada :

Nama : N I S A R  
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 18 Juni 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa STAIN  
Alamat : Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

Untuk: Melakukan Penelitian di Kecamatan Soreang dan 7 (Tujuh) Kelurahan di Wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan Judul "**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN; PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE)**" Selama 2 (Dua) Bulan. TMT. 12 Oktober 2015 s/d 25 Desember 2015.

Demikian Surat Izin ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Pangkat : Pembina  
Nip : 19590629 198103 1011



## PEMERINTAH KOTA PAREPARE

### KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare

Email : [soreang@pareparekota.go.id](mailto:soreang@pareparekota.go.id) Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 – 07 / KCS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H A M R I, S.Pd

N I P : 19600105 198503 1 020

Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi STAIN Kota Parepare yang tersebut di bawah ini :

Nama : N I S A R

Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 18 Juni 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

No. Stambuk : 11.2200.079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian / wawancara dengan judul *“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN; PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”*, sejak tanggal 12 Oktober s/d 25 Desember 2015, berdasarkan Surat Ijin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/1054/BKBP, tanggal 12 Oktober 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 11 Januari 2016

CAMAT SOREANG,

H A M R I, S.Pd

Pangkat : Pembina

N I P : 1960105 198503 1 020

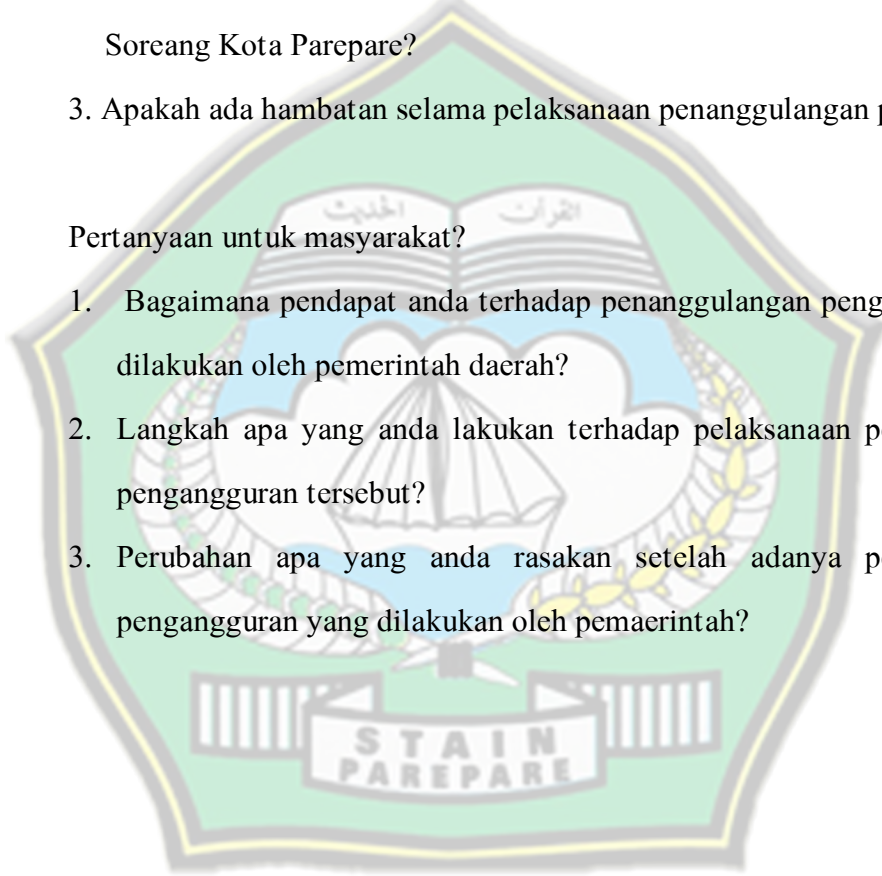
## OUTLINE PERTANYAAN

Pertanyaan Untuk Pemerintah Daerah:

1. Apa strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan pengangguran di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
3. Apakah ada hambatan selama pelaksanaan penanggulangan pengangguran?

Pertanyaan untuk masyarakat?

1. Bagaimana pendapat anda terhadap penanggulangan pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah daerah?
2. Langkah apa yang anda lakukan terhadap pelaksanaan penanggulangan pengangguran tersebut?
3. Perubahan apa yang anda rasakan setelah adanya penanggulangan pengangguran yang dilakukan oleh pemaerintah?





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

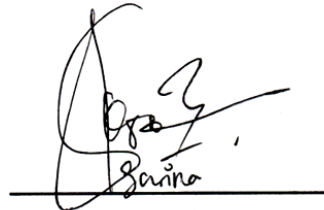
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifina  
Pekerjaan : Wirausaha  
Umur : 31 tahun  
Alamat : Cempae

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nisar yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Januari 2016  
Narasumber,



Saifina

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iping  
Pekerjaan : Nelayan  
Umur : 40 tahun  
Alamat : Cempae

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nisar yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Februari 2016  
Narasumber,

  
Iping

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursia  
Pekerjaan : Pelelagaug Eceran  
Umur : 44 tahun  
Alamat : Bukit harapan, Jl Amal Bakti

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nisar yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 februari 2016  
Narasumber,

  
Nursia

## DOKUMENTASI

Pelatihan Keterampilan



Pelatihan Pelaku Usah Ekonomi



## RIWAYAT HIDUP



**Nisar** , Lahir pada tanggal 18 Agustus 1993. Anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Toro Akkas dan Hartati Puan Jango di Urung Kabupaten Pinrang Sul– Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 259 Pinrang pada tahun 1998 – 2004 selama 6 Tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Patampanua pada tahun 2004 – 2007 selama 3 Tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Pinrang pada tahun 2007 – 2010 selama 3 Tahun, pada Tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)”.

Contact: [istiqamahap@gmail.com](mailto:istiqamahap@gmail.com)